

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA MARITIM INDONESIA DAN
AUSTRALIA DI BIDANG KESELAMATAN PELAYARAN
OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.)
dalam bidang Hubungan Internasional



Rihhadatul Aisy Az Zahra

NIM 10020221065

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Juni, 2025

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rihhadatul Aisy Az Zahra

Nim : 10020221065

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Implementasi Kerja Sama Maritim Indonesia dan Australia
di Bidang Keselamatan Maritim Oleh Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut Tahun 2018-2022

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun,
2. Skripsi ini adalah benar benar hasil karya saya secara mandiri, orsinil, dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain,
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 2 Juni 2025

Yang Menyatakan



Rihhadatul Aisy Az Zahra

NIM 10020221065

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rihhadatul Aisy Az Zahra

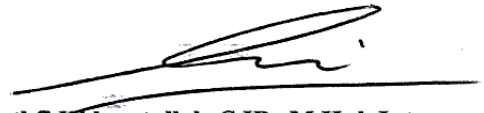
NIM : 10020221065

Program Studi : Hubungan Internasional

Berjudul *Peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Di Bidang Keamanan Pelayaran dalam Kerja Sama Maritim Indonesia Dan Australia Tahun 2018 – 2022*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.

NIP 199104092020121012

PENGESAHAN

Skripsi oleh Rihhadatul Aisy Az Zahra dengan judul *Implementasi Kerja Sama Maritim Indonesia dan Australia di Bidang Keselamatan Maritim Oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018-2022* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 13 Juni 2025.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP 19910409202012012

Penguji II



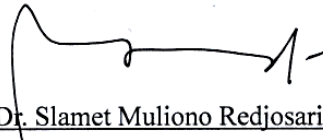
Dra. Hj. Wahidah Zein Br Siregar, MA, Ph.D.
NIP 196901051993032001

Penguji III



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP 199003252018012001

Penguji IV



Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si.
NIP 196811291996031003

Surabaya, 13 Juni 2025

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rihhadatul Aisy Az Zahra
NIM : 10020221065
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : raaisyazhr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi kerja sama Maritim Indonesia dan Australia
di Bidang Keselamatan Pelayaran Oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Tahun 2018- 2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juni 2025

Penulis

(RIHHADATUL AISY AZ ZAHRA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Zahra, Rihhadatul Aisy Az. “Implementation of Maritime Cooperation between Indonesia and Australia in the Field of Maritime Safety by the Directorate General of Sea Transportation in 2018-2022.” The State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, 2025.

The issue of maritime safety is a strategic concern for Indonesia and Australia, especially after the increasing number of marine accidents and the need to create safe, orderly, and in accordance with international standards. This study aims to analyze the implementation of bilateral cooperation in the field of shipping safety through the Plan of Action for 2018–2022, focusing on the role of the Directorate General of Sea Transportation (DGST). The research uses a qualitative descriptive method and is analyzed through the framework of the international policy cycle as developed by Sebastian Paulo, which includes the stages of agenda setting, decision-making, implementation, and compliance monitoring and evaluation. The results of the study show that this cooperation began with the articulation of shipping safety issues as a common agenda through declarative documents, which were then outlined in the Plan of Action as a result of negotiations between state actors. DGST plays an active role in the implementation stage through various concrete programs such as technical training, expert exchange, and policy assistance. Australia contributed as a resource provider and technical companion, while Indonesia showed adaptive capacity despite still facing structural limitations. At the evaluation and monitoring stage, there is no formal sanction mechanism, but compliance is maintained through a reporting system and agenda sustainability. This cooperation has not resulted in comprehensive institutional reforms, but it has driven sustainability through a new cooperation agenda and institutional capacity building. This study concludes that this bilateral cooperation reflects the practice of international cooperation governance that is gradual, adaptive, and based on strategic interdependence between countries.

Keywords: Indonesia-Australia Maritime Cooperation, Directorate General of Sea Transportation, Maritime Safety.

ABSTRAK

Zahra, Rihhadatul Aisy Az. “Implementasi Kerja Sama Maritim Indonesia dan Australia di Bidang Keselamatan Maritim Oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018-2022.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025.

Isu keselamatan pelayaran menjadi perhatian strategis bagi Indonesia dan Australia, khususnya setelah meningkatnya jumlah kecelakaan laut dan perlunya menciptakan perairan yang aman, tertib, dan sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerja sama bilateral dalam bidang keselamatan pelayaran melalui Plan of Action tahun 2018–2022, dengan fokus pada peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dianalisis melalui kerangka siklus kebijakan internasional sebagaimana dikembangkan oleh Sebastian Paulo, yang mencakup tahapan agenda setting, decision-making, implementation, serta compliance monitoring and evaluation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini diawali dengan artikulasi isu keselamatan pelayaran sebagai agenda bersama melalui dokumen deklaratif, yang kemudian dituangkan dalam Plan of Action sebagai hasil negosiasi antaraktor negara. DJPL berperan aktif dalam tahap implementasi melalui berbagai program konkret seperti pelatihan teknis, pertukaran ahli, serta asistensi kebijakan. Australia berkontribusi sebagai penyedia sumber daya dan pendamping teknis, sedangkan Indonesia menunjukkan kapasitas adaptif meskipun masih menghadapi keterbatasan struktural. Pada tahap evaluasi dan monitoring, tidak terdapat mekanisme sanksi formal, namun kepatuhan tetap dijaga melalui sistem pelaporan dan keberlanjutan agenda. Kerja sama ini belum menghasilkan reformasi kelembagaan secara menyeluruh, namun telah mendorong keberlanjutan melalui agenda kerja sama baru dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama bilateral ini mencerminkan praktik tata kelola kerja sama internasional yang bertahap, adaptif, dan berbasis interdependensi strategis antar negara.

Kata Kunci: Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Keselamatan Maritim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA.....	24
A. Definisi Konseptual.....	24
1. Implementasi Kerja Sama.....	24

2. Kerja Sama Internasional	26
3. Keselamatan Maritim	35
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	38
B. Kerangka Konseptual.....	40
C. Argumentasi Utama	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Masalah Penelitian	44
B. Unit dan Perangkat Analisis.....	45
C. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Teknik Validasi Data	53
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Governance Mechanism Kerja Sama Maritim Indonesia–Australia.....	54
1. Tipe Hubungan: Donor-Recipient.....	54
2. Aktor dan Peran Institusional.....	57
B. Agenda Setting: Artikulasi Isu Keselamatan Maritim sebagai Prioritas Bersama	60
1. Identifikasi dan Artikulasi Isu	61
2. Atensi Politis Oleh Aktor Negara: Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Australia.....	62
3. Pengakuan Formal Melalui Dokumen Resmi: <i>Joint Declaration on Maritime Cooperation</i>	64
C. Decision-Making: Penyusunan Plan of Action 2018–2022	67
D. Implementation: Praktik Pelaksanaan oleh DJPL	76
1. Skala Implementasi: Penerjemahan Komitmen Internasional ke dalam	

Regulasi Domestik.....	76
2. Tipe Aktivitas.....	80
3. Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Antar Regulator: Terstruktur di Atas Kertas, Terfragmentasi dalam Praktik.....	84
4. Navigasi Tantangan Domestik Hingga Internasional: Ketimpangan Kapasitas, Fragmentasi Lembaga, dan Disparitas Kepentingan.....	87
E. Compliance Monitoring & Generation Evaluation: Kepatuhan dan Dampak Substantif.....	90
1. Penyampaian Laporan Kepada Mitra Kerjasama: Ada Aktivitas, Minim Dokumentasi Formal	90
2. Mekanisme Pemantauan atau Pengawasan: Ketidakhadiran Struktur Formal, Ketergantungan pada Trust-Based Governance.....	92
3. Perubahan Nyata: Peningkatan Kompetensi dan Adaptasi Terbatas di Unit Teknis	95
4. Dampak Jangka Panjang: Perubahan Perilaku Terbatas dan Belum Terinstitusionalisasi	98
5. Perubahan Kebijakan Berdasarkan Tantangan Implementasi: Respons Terbatas, Kecuali pada Sektor Pencemaran Laut	100
6. Agenda Baru Berdasarkan Kesenjangan Efektivitas: Transisi Menuju Kerangka Strategis yang Lebih Luas	103
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	cxix
LAMPIRAN.....	cxv

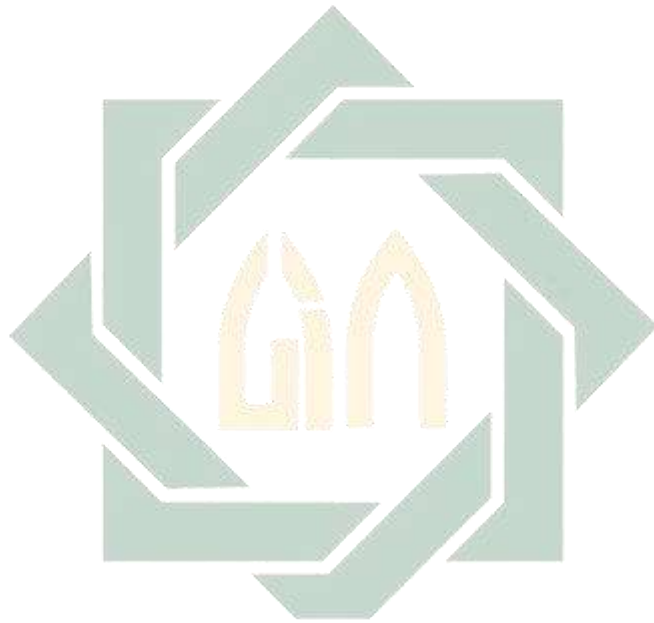
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Insiden Kecelakaan Pelayaran Tahun 2018-2022	2
Gambar 2. 1 Konsep Implementasi Kerja Sama	29
Gambar 4. 1 Menlu Retno Marsudi dengan Menlu Australia Julie Bishop	63
Gambar 4. 2 Deklarasi Kerja Sama Bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Australia	65
Gambar 4. 3 Sektor Pelayaran Menjadi Pilar Utama dalam Deklarasi Bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia	66
Gambar 4. 4 Mid-term Review Terjadwal.....	70
Gambar 4. 5 Contact Point Tertera dalam MoU	85
Gambar 4. 6 MoU antara Pemerintah Indonesia dan Australia Tentang Pencemaran Laut Lintas Batas.....	101
Gambar 4. 7 Plan of Action Comprehensive Strategic Partnership antara Pemerintah Indonesia dan Australia	104

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Konseptual Implementasi Kerja Sama	40
Tabel 4. 1 Kegiatan Spesifik di Bidang Keamanan Maritim dalam Kerangka Plan of Action for the Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia.....	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Keohane, R. O. ., & Nye, J. S. . (2012). Power and interdependence. Longman.
- Kirk Emerson, T. N. (2015). Collaborative Governance Regimes. Georgetown University Press.
- Underdal, A. (1992). The Concept of Regime 'Effectiveness'. Cooperation and Conflict, 227-240.

JURNAL

- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). Trustees of Princeton University Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. In Source: World Politics (Vol. 38, Issue 1).
- Bradford, J. F. (2005). The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia. In Naval War College Review (Vol. 58, Issue 3). <https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review>
- Chauvin, C. (2011). Human factors and maritime safety. *The Journal of Navigation*, 64(4), 625-632.
- Dwi Utami, A.-, Muslimah, S., & Torry Satriyo Kusumo, A. (2014). YURISDIKSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN PEROMPAKAN di LAUT LEPAS. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10130>
- Finaldin, T., & Yulianti, N. N. (2021). Implementasi Kerja Sama Indonesia Dan Malaysia Dalam Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Pada Pemerintahan Periode Kedua Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014). *Global Mind*, 3(1), 21-37.
- Formela, K., Neumann, T., & Weintrit, A. (2019). Overview of definitions of maritime safety, safety at sea, navigational safety and safety in general. *TransNav*, 13(2), 285–290. <https://doi.org/10.12716/1001.13.02.03>
- Grieco, J., Powell, R., & Snidal, D. (1993). The Relative-Gains Problem for International Cooperation. In Source: The American Political Science Review (Vol. 87, Issue 3).
- Herlina, A., Imigrasi, P., Pengembangan, B., Daya, S., Kementerian, M., Dan, H., Asasi, H., & Ri, M. (2021). Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat Dalam Skema Kerjasama IA-CEPA.

Iswardhana, M. R. R. (2021). Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard. JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN), 4(1), 1–15.
<https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1569>

Jalloh, Charles Chernor. “The International Law Commission’s Seventy-Fourth (2023) Session: General Principles of Law and Other Topics.” *American Journal of International Law* 118, no. 1 (January 2024): 120–44.
<https://doi.org/10.1017/ajil.2023.59>.

Jeremy, F. (2003). Maritime transportation: A third way for. *Widener Law Symposium Journal*, 9(Port and Environmental Security), 405–423.

Le Mière, C. (2011). Policing the Waves: Maritime Paramilitaries in the Asia-Pacific. *Survival*, 53(1), 133–146.
<https://doi.org/10.1080/00396338.2011.555607>

Mantong, A. W., Kembara, G., Dzakwan, M., & Kharisma, M. (2020). Maritime safety In Indonesia: Mapping the challenges and opportunities. *Center for Strategic and International Studies. Indonesia*.

Milner, H. (1992). International Theories of Cooperation Among Nations: Strengths and Weaknesses. *World Politics*, 44(3), 466–496.
<https://doi.org/10.2307/2010546>

Mitchell, R. B. (2001). Institutional aspects of implementation, compliance, and effectiveness. *International relations and global climate change*, 221–244.

Paulo, Sebastian. (2014). International cooperation and development : a conceptual overview. *Deutsches Institut für Entwicklungspolitik*.

Prabowo, A. R. (2022). Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 176–195.
<https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.169>

Roe, M. S. (2008). Safety, security, the environment and shipping: The problem of making effective policies. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 7(1), 263–279.
<https://doi.org/10.1007/BF03195135>

Scott, B. (1999). A Theory of Full International Cooperation. *Journal of Theoretical Politics*, 11(4), 519–541.

Sherwood, D. (1998). A Role for Maritime Cooperation. *Maritime Studies*, 1998(99), 1–12. <https://doi.org/10.1080/07266472.1998.10878508>

Stiawan, F. D., & Kurniawan, A. T. (2019). Analisis Implementasi Kerjasama UPT Perpustakaan IAIN Salatiga dengan Kedutaan Besar India dalam Penyediaan Layanan India Corner. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(2), 41-50.

Tiaradipa, T., & Hidayatullah, N. L. (2024). Indonesia's Maritime Security Strategy in Countering Illegal Fishing Through the Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum in 2018-2022. In *The SARPASS* (Vol. 03, Issue 02).

Turedi, O., & Ozer-Caylan, D. (2021). Developing a grounded theory of national maritime policies based on safety, security and environment. *Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping*, 5(2), 84–97. <https://doi.org/10.1080/25725084.2021.1939642>

SITUS INTERNET

“Aktor Dalam Hubungan Internasional: Aktor Negara Dan Aktor Non Negara.” Accessed May 16, 2025. <https://www.jurnalhi.com/2021/08/aktor-dalam-hubungan-internasional.html>.

shippingcargo.co.id. “Mengenal Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Pilar Utama Penjaga Keselamatan Pelayaran.” Accessed May 16, 2025. <https://shippingcargo.co.id/posts/309739/mengenal-kesatuan-penjagaan-laut-dan-pantai-kplp-pilar-utama-penjaga-keselamatan-pelayaran>.

XMLThemes. “Ketika Indonesia Harus Memilih antara PLP, KPLP, dan BAKAMLA.” eMaritim.CoM. Accessed May 16, 2025. https://www.emaritim.com/2018/01/ketika-indonesia-harus-memilih-antara_20.html#google_vignette.

LAPORAN ATAU DOKUMEN PEMERINTAH

Bagian Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Sekertariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, *Recap Kegiatan Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia dan Australia (2018-2022)*.

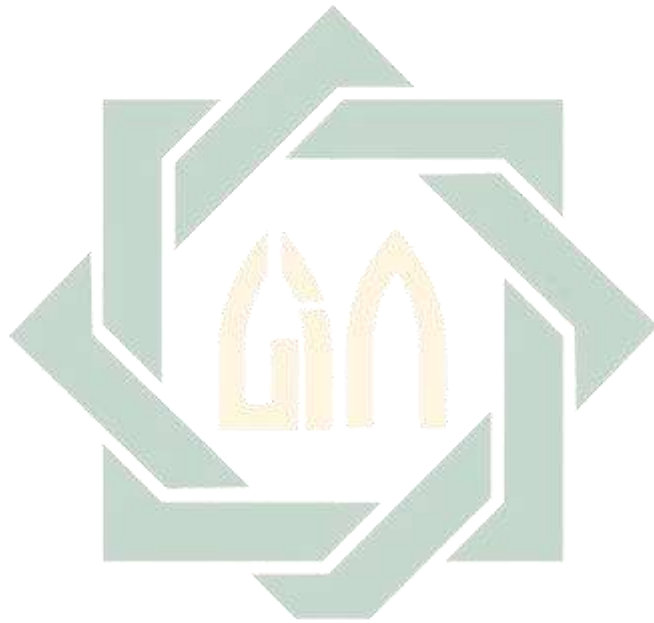
Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Deklarasi Kerja Sama Bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia*, 2017.

Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Plan of Action for the Implementation of the*

Joint Declaration on Maritime Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia, 2018.

Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut Lintas Batas, 2024.*

Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Plan of Action for the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (2025-2029), 2025.*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A